



Peran Dana Kelurahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Kota Surabaya

Mochammad Nabil Firzatulloh ¹⁾, Agus Widiyarta ²⁾

Universitas Pembangunan 'Veteran' Jawa Timur, Surabaya, Indonesia

nabifirzatulloh72@gmail.com ¹⁾
aguswidiyarta.adneg@upnjatim.ac.id ²⁾

Abstrak

Artikel ini bertujuan untuk menganalisis peran Dana Kelurahan dalam mendorong pembangunan infrastruktur lokal di Kota Surabaya. Dengan pendekatan kualitatif, penelitian ini untuk mengetahui peran program Dana Kelurahan yang didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan, serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya. Dari hasil artikel ini menunjukkan bahwa Dana Kelurahan memiliki peran strategis dalam pembangunan infrastruktur. Proses perencanaan melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan. Penelitian menyimpulkan bahwa Dana Kelurahan di Kota Surabaya merupakan program pembangunan yang efektif, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, yang memposisikan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam proses pembangunan wilayahnya.

Kata kunci: Dana Kelurahan, Partisipasi Masyarakat, Pembangunan Infrastruktur, Surabaya

Abstract

Manuscripts must be accompanied by an abstract written in Arial font size 10pt in one paragraph using two languages (Indonesian and English) for 100 - 150 words. Writing abbreviations and mathematical formulas in the abstract should be avoided. The abstract briefly describes the problem, objectives, methods, and research results. Complete sentences must contain at least a subject and a predicate. In writing passive sentences, the subject and predicate elements must be clear, not confused with the information element (object). The results of this article indicate that the Village Fund plays a strategic role in infrastructure development. The planning process involves active community participation through the Development Planning Deliberation. The impact of this program is significant, not only in enhancing physical infrastructure but also in boosting economic growth, creating job opportunities, and improving the quality of life for residents. Through community involvement, the Village Fund program has successfully fostered a sense of ownership and shared responsibility, as well as promoting sustainable and inclusive development at the village level. The research concludes that the Village Fund in Surabaya City is an effective, transparent, and responsive development program that positions the community as active participants in the development of their region.

Key words: Community Participation, Infrastructure Development, Surabaya, Village Funds

PENDAHULUAN

Surabaya merupakan kota terbesar kedua di Indonesia, Dianggap kota metropolitan kedua setelah Jakarta. Pada tahun 2024 jumlah penduduk kota surabaya mencapai 3.009.286 Jiwa, dimana jumlah ini berpengaruh pada tempat



tinggal yang akan semakin bertambah banyak dan kondisi rumah yang semakin berdekatan satu sama lain. Dengan pertumbuhan populasi yang signifikan, hal ini dapat menghadirkan tantangan dan peluang baru bagi pemerintah daerah, dari sektor pembangunan infrastruktur lokal dan pemberdayaan masyarakat. Munculnya tantangan baru dan peluang baru akan membuat pemerintah daerah memberikan inovasi baru untuk menjaga keseimbangan pembangunan di Kota Surabaya. Dengan adanya Dana Kelurahan dapat mendukung Pembangunan Infrastruktur lokal dan Pemberdayaan masyarakat, Sehingga mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi, serta menciptakan lingkungan yang lebih baik dan berkelanjutan. Dana Kelurahan juga dapat digunakan untuk mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam proses pembangunan atau swakelola tipe IV, memastikan terpenuhinya kebutuhan lokal, dan mendukung pemerataan pembangunan.

Dana kelurahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang termasuk dalam Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan. DAU sendiri merupakan dana dari pendapatan APBN yang dialokasikan untuk mendukung pemerataan kapasitas keuangan antar daerah guna memenuhi kebutuhan daerah dalam pelaksanaan desentralisasi (Sanger, 2023). DAU Tambahan berfungsi sebagai pendanaan tambahan bagi kelurahan, yang ditujukan untuk pembangunan infrastruktur lokal serta pemberdayaan masyarakat. Dengan hadirnya DAU Tambahan, diharapkan setiap kelurahan bisa meningkatkan fasilitas dan infrastruktur yang ada serta memperbaiki kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Peraturan Daerah (Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019) tentang Pengelolaan Dana Kelurahan menjadi dasar hukum utama dalam pelaksanaan program dana kelurahan di Kota Surabaya. Peraturan ini mengatur berbagai hal penting, seperti tujuan program dana kelurahan, cakupan pengelolaan, sumber dana, pemanfaatan dana, serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah Kota Surabaya menetapkan bahwa dana kelurahan berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya, yang ditujukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di tingkat kelurahan. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 70 Tahun 2022 adalah pembaruan dari Peraturan Walikota Surabaya Nomor 68 Tahun 2019, Pembaruan ini dilakukan untuk menyesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan terbaru dalam pengelolaan dana kelurahan di Kota Surabaya serta Perubahan yang dilakukan mencakup penyesuaian alokasi dana kelurahan, mekanisme pencairan, serta tata cara pelaporan dan pertanggungjawaban. Peraturan Walikota Surabaya Nomor 28 Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan Tahun Anggaran 2023 memiliki kaitan erat dengan implementasi program dana kelurahan. Peraturan ini berfungsi sebagai panduan bagi setiap kelurahan di Kota Surabaya dalam menyusun Anggaran Pendapatan dan Belanja Kelurahan (APBKEL), termasuk dalam mengalokasikan dana kelurahan. Dengan mengacu pada pedoman ini, setiap kelurahan dapat merancang penggunaan dana kelurahan secara sistematis dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat setempat.

Dengan adanya landasan hukum yang jelas melalui peraturan ini memungkinkan program dana kelurahan di Kota Surabaya dikelola secara efisien. Diharapkan, hal ini dapat meningkatkan pembangunan sarana dan prasarana di tingkat kelurahan, karena dana kelurahan dapat dimanfaatkan secara tepat dan akuntabel sesuai kebutuhan masing-masing kelurahan.

Dengan penjelasan latar belakang diatas maka Rumusan Masalah dalam



penelitian ini adalah “Bagaimana Peran Dana Kelurahan Dalam Meningkatkan Pembangunan Infrastruktur Di Kota Surabaya”. Penulis menerapkan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Selain itu, Penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi pustaka sebagai salah satu sumber data utama

METODE

Metode Penulis menerapkan metode deskriptif kualitatif yang bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang fenomena yang sedang diteliti. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan studi pustaka sebagai salah satu sumber data utama, seperti peraturan walikota, laporan pelaksanaan dan artikel jurnal/berita. Dengan cara ini, penelitian ini tidak hanya berfokus pada pengumpulan data empiris, tetapi juga menggabungkan pengetahuan yang ada untuk memberikan gambaran yang lebih mendalam terkait Dana Kelurahan yang ada Di Kota Surabaya.

HASIL DAN PEMBAHASAN (Arial 12pt, tebal)

Peran Dana Kelurahan Dalam Pembangunan Infrastruktur

Aspek Pembangunan infrastruktur Dana Kelurahan Di Kota Surabaya mencakup serangkaian upaya strategi pemerintah dalam melakukan pemerataan pembangunan maupun dalam memperbaiki fasilitas umum. Dana Kelurahan bertujuan untuk mempercepat pemerataan pembangunan sarana dan prasarana serta meningkatkan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan guna mendukung kesejahteraan masyarakat (Wicaksana & Rachman, 2018). Fokus utama dalam Dana Kelurahan yang ada di Surabaya yaitu terletak pada pembangunan infrastruktur/perbaikan Infrastruktur yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar. Seperti rehabilitasi jalan atau pavingisasi, perbaikan saluran air, pembangunan drainase, pelebaran makam umum dan rehabilitasi lokasi pelayanan publik. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kenyamanan bagi masyarakat sekitar.

Setiap pembangunan sarana dan prasarana dirancang dengan mempertimbangkan kebutuhan spesifik masyarakat setempat, partisipasi warga dan potensi pengembangan wilayah. Masyarakat dilibatkan dalam proses perencanaan pembangunan yang bertujuan untuk memastikan bahwa pembangunan sesuai dengan kebutuhan dan harapan masyarakat. Partisipasi Masyarakat sangat perlu dalam hal perkembangan suatu kelurahan untuk tahap dalam penyesuaian menuju kelurahan berkembang maju (Wahongan, 2019). Dengan adanya Dana Kelurahan Pemerintah Kota Surabaya berupaya melakukan pembangunan yang merata pada setiap daerahnya dan pemberdayaan masyarakat.

Mekanisme Pendanaan

Sistem pendanaan Dana Kelurahan di Kota Surabaya dirancang secara terstruktur untuk mendukung pembangunan infrastruktur lokal secara efisien dan transparan, nilai transparansi yang tinggi akan berdampak dengan nilai efektivitas yang tinggi terhadap Dana Kelurahan (Christopher Djamiraga & Diah Widajantie, 2022). Proses ini diawali dengan tahap perencanaan melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), di mana pemerintah dan masyarakat bekerja sama untuk mengidentifikasi kebutuhan infrastruktur dan menentukan prioritas pembangunan berdasarkan kondisi spesifik wilayah.

Sumber pendanaan Dana Kelurahan Kota Surabaya berasal dari APBD dan juga Dana Alokasi Umum Tambahan, Anggaran untuk setiap kelurahan dipilih berdasarkan kebutuhan masing-masing. Sebesar 50% dari DAU Tambahan untuk Bantuan Pendanaan Kelurahan menjadi alokasi dasar bagi setiap kelurahan, ditambah dengan dana dari APBD yang disesuaikan dengan kebutuhan prioritas masing-masing kelurahan. Setiap progres pembangunan infrastruktur Pemerintah Kota Surabaya akan melakukan monitoring dan evaluasi serta meninjau langsung proses pengerjaannya pada setiap kelurahan.



Gambar 1.1 Dokumentasi Penulis Saat Meninjau Progres Pembangunan

Pemerintah Kota Surabaya juga melakukan rapat pertemuan bersama kelurahan guna pelaporan akhir yang dilakukan setiap tahun nya terkait dana kelurahan guna menjadikan bukti bahwa setiap kelurahan telah memanfaatkan alokasi dana kelurahan sesuai dengan kebutuhan setiap wilayah.

Dampak Pembangunan

Pembangunan infrastruktur yang didanai melalui dana kelurahan di Kota Surabaya memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kualitas fasilitas umum pada setiap daerahnya. Infrastruktur yang baik dapat meningkatkan kesejahteraan sosial dengan meningkatkan interaksi komunitas dan akses ke layanan dasar (Ekonomi & Ekman, 2024). Selain itu, infrastruktur yang lebih baik berkontribusi pada peningkatan kualitas hidup warga, dengan memudahkan akses ke layanan penting seperti kesehatan, pendidikan, dan transportasi. Keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek infrastruktur juga menciptakan rasa kepemilikan dan tanggung jawab, yang memperkuat rasa sosial di tingkat kelurahan. Proyek-proyek ini sering kali menciptakan lapangan kerja bagi penduduk setempat, sehingga membantu mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan taraf hidup. Karena Dana Kelurahan merupakan pembangunan swakelola tipe IV.



Gambar 1.2 Dokumentasi Penulis Saat Meninjau Progres Pembangunan

Di sisi lain, pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan dapat menghasilkan pengelolaan limbah yang lebih baik dan ruang terbuka hijau, yang mendukung lingkungan perkotaan yang lebih sehat. Secara keseluruhan, dampak pembangunan infrastruktur melalui dana kelurahan di Surabaya bersifat multifaset, memberikan kontribusi positif terhadap kemajuan ekonomi dan sosial kota.

SIMPULAN DAN SARAN

Dana Kelurahan di Kota Surabaya merupakan instrumen penting dalam upaya pembangunan infrastruktur lokal dan pemberdayaan masyarakat. Program ini memiliki landasan hukum yang kuat, diatur melalui berbagai peraturan walikota, dan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) melalui Dana Alokasi Umum (DAU) Tambahan serta Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Surabaya.

Fokus utama program ini adalah pembangunan infrastruktur yang dapat dirasakan langsung oleh masyarakat sekitar, seperti rehabilitasi jalan, perbaikan saluran air, pembangunan drainase, pelebaran makam umum, dan perbaikan lokasi pelayanan publik. Yang menarik, proses perencanaan melibatkan partisipasi aktif masyarakat melalui Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang), di mana masyarakat dan pemerintah bersama-sama mengidentifikasi kebutuhan dan menetapkan prioritas pembangunan sesuai kondisi spesifik wilayah masing-masing.

Dampak dari program Dana Kelurahan sangat signifikan. Tidak hanya meningkatkan infrastruktur fisik, tetapi juga berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan kualitas hidup warga. Melalui keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pelaksanaan proyek, program ini berhasil menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab bersama, serta mendorong pembangunan yang berkelanjutan dan inklusif di tingkat kelurahan. Dana Kelurahan di Kota Surabaya telah menunjukkan potensi besar dalam mewujudkan pembangunan daerah yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat, transparan, dan berkelanjutan. Program ini tidak sekadar transfer dana, melainkan sebuah strategi pemberdayaan yang memposisikan masyarakat sebagai pelaku aktif dalam proses pembangunan di wilayahnya sendiri.

Berdasarkan hasil artikel tersebut, penulis menyarankan agar Pemerintah Kota Surabaya terus meningkatkan keterlibatan masyarakat dalam perencanaan dan pengelolaan Dana Kelurahan melalui sosialisasi yang lebih intensif dan pelatihan khusus, sehingga masyarakat dari berbagai lapisan dapat berpartisipasi secara aktif. Selain itu, pengawasan dan evaluasi terhadap penggunaan dana perlu diperkuat dengan memanfaatkan teknologi digital untuk memantau realisasi proyek secara transparan dan akuntabel. Diversifikasi program pemberdayaan juga menjadi hal



penting, di mana Dana Kelurahan tidak hanya fokus pada pembangunan infrastruktur fisik tetapi juga mendukung pengembangan ekonomi masyarakat melalui pelatihan keterampilan dan penguatan UMKM. Di sisi lain, kolaborasi dengan sektor swasta dan lembaga pendidikan dapat memperluas inovasi dalam pembangunan, sementara integrasi teknologi seperti sistem informasi geografis dapat membantu perencanaan infrastruktur yang lebih efektif dan efisien. Dengan langkah-langkah ini, program Dana Kelurahan dapat terus menjadi instrumen strategis yang berkelanjutan dan inklusif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat Surabaya.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga artikel ini dapat diselesaikan dengan baik. Kami menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada dosen pembimbing, [nama dosen], yang telah dengan sabar memberikan arahan, bimbingan, dan masukan berharga selama proses penyusunan artikel ini. Dukungan, pengetahuan, dan perhatian yang diberikan sangat membantu kami dalam menyelesaikan tugas ini. Kami juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah mendukung, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam penyelesaian artikel ini. Ucapan terima kasih ini kami sampaikan kepada keluarga, teman, serta rekan-rekan yang memberikan semangat, dukungan moral, dan bantuan selama proses ini berlangsung.

Semoga kebaikan yang telah diberikan mendapat balasan yang berlipat ganda, dan hasil dari artikel ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang membacanya. Demikian ucapan terima kasih ini kami sampaikan dengan setulus hati.

DAFTAR PUSTAKA

- Christopher Djamiraga, A., & Diah Widajantie, T. (2022). Pengaruh kompetensi dan transparansi terhadap efektivitas pengelolaan dana kelurahan pada kelurahan di Kecamatan Gubeng Kota Surabaya. *Fair Value: Jurnal Ilmiah Akuntansi Dan Keuangan*, 4(11), 4806–4814. <https://doi.org/10.32670/fairvalue.v4i11.1779>
- Ekonomi, J., & Ekman, M. (2024). *Analisis Dampak Pembangunan Infrastruktur terhadap Kesejahteraan Masyarakat Pedesaan di Kabupaten Bulungan*. 3(1), 1–12.
- Sanger, O. C. (2023). Analisis Akuntabilitas Pelaporan Alokasi Dana Kelurahan Dimasa Pandemi Covid-19 Pada Kantor Kelurahan Titiwungen Selatan. *Jurnal LPPM Bidang EkoSusBudKam*, 7(4), 269–276.
- Wahongan, S. (2019). Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan Bagi Pembangunan. *Jurnal Politico*, 8(1), 1–10.
- Wicaksana, A., & Rachman, T. (2018). Kinerja Pemerintah Kelurahan Dalam Pengelolaan Dana Kelurahan(Suatu Studi Di Kelurahan Uwuran 2 Kecamatan Amurang Kabupaten Minahasa Selatan Selatan). *Angewandte Chemie International Edition*, 6(11), 951–952., 3(1), 10–27. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/jurnaleksektif/article/view/45918/4114>
- 9